

**MODEL PEMETAAN POTENSI DAERAH MENUJU KEMANDIRIAN  
FISKAL  
DI JAWA TIMUR**

Syamsul Huda  
[syamsulhuda.prof@yahoo.com](mailto:syamsulhuda.prof@yahoo.com)  
Zumrotul Fitriyah  
[zfitriyah.up@gmail.com](mailto:zfitriyah.up@gmail.com)  
muchtolifah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Jl. RayaRungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

**ABSTRAKSI**

Dengan munculnya UU No .22 tahun 1999 yang mengatur perlimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UUNo.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat dan daerah khususnya di Kabupaten //kota di Jawa Timur dengan mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian daerah Kabupaten/ Kota di Jatim Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu analisa yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kuantitatif yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal untu mengetahui tingkat kemandirian daerah dan potensi ekonomi sektoral di Kabupaten /Kota di Jawa Timur sehingga dapat mengetahui tingkat kemandirian fiskal dan potensi Ekonomi daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan mengethui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten /Kota di Jawa Timur serta formula kebijakan yang tepat untuk pengembangan ekonomi ke depan.

***Kata kunci : Desentralisasi fiskal, KemandirianDaerah***

## ABSTRACT

*With the advent of Law No .22 years 1999 set an authority and responsibility from central government to local government and UUNo.25 1999 governing financial between the center and regions, especially in the District city in East Java n local resources and reduce dependence of the center.*

*This study aims to determine the independence of the Regency / City in East Java analysis used is qualitative analysis, the analysis that are explained in the description or in the form of sentences*

*This study aims to determine the independence of the Regency / City in East Java analysis used is qualitative analysis, the analysis that are explained in the description or in the form of sentences and quantitative analysis, namely analysis using formulas and definite analysis. Quantitative analysis includes the analysis of the degree of fiscal decentralization determine the level of independence of regional and sectoral economic potential in the District East Java so that it can determine the level of fiscal independence and economic potential of the region. Results are expected to be used i pattern of the relationship between the central government and the government in the district / city in East Java as well as the formula right policy for future economic development.*

*From this research it is known that the city of Surabaya has a degree of fiscal autonomy for PAD at 48% of revenue while the region Gresik on the degree of fiscal autonomy degree Enough and Sidoarjo district in degrees, please. There are 32 regions in the East dijawa degree of fiscal independence of each very less independent, meaning of Balance Funds as well as from centers of poropinsi*

***Keywords: Fiscal decentralization, Independence area***

## PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai beberapa tahun yang lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek pemerintahan, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan pada aspek pemerintahan didorong oleh berbagai tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih demokratis, sehingga menuntut suatu perubahan pemerintah pusat agar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Devy Octaviana S (2013:1)

Menurut Kurniawan (2006), disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan langkah besar yang ditunggu-tunggu oleh daerah. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, yang selama ini

dirasakan adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembangunan antara pusat dan daerah. Undang-undang tersebut selanjutnya disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Khusaini (2006), sesuai dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyerahan berbagai kewenangan ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Mohammad Sholahuddin Yusuf (2014), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah, namun proporsi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan asli daerah. Dalam penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan

Menurut Khusaini (2006), sesuai dengan UU No. 32 dan 33 tahun 2004, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penyerahan berbagai kewenangan ini harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah, di mana salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah.

Menurut Waluyo (2005), pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang.

Kurniawan (2006) menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Pemerintah pusat telah menunjang

penerimaan bagi pemerintah daerah melalui pembagian pajak pusat untuk menunjang pembangunan di daerah, di antaranya, melalui Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No.11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Provinsi Jawa Timur. Pada data Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang didapatkan dari DPPAD Provinsi Jawa Timur, terlihat besarnya total pajak daerah pada akhir tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp31.661.000.000,00 Tahun 2011 sebesar Rp.38.121.000.000,00 Tahun 2012 sebesar Rp.36.351.000.000,00 Tahun 2013 sebesar Rp.31.201.000.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp.21.001.000.000,00.

data diatas, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi dalam penerimaan pajak dan bahkan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kemandirian pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perlu pendalaman untuk mengetahui lebih jauh dari penurunan data tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis merumuskan masalah tentang (1) apakah pemetaan potensi keuangan daerah di masing-masing Kabupaten atau Kota berpengaruh terhadap kemandirian keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur, (2) apakah Tingkat Kemandirian Fiskal di Kabupaten atau kota berpengaruh terhadap kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur, (3) apakah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.

Maksud dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui luasnya cakupan penelitian yang diarahkan pada tujuan sebagai berikut : (1) Mengidentifikasi Pemetaan potensi Keuangan daerah di masing-masing Kabupaten atau kota di Jawa Timur, (2) Menganalisis Faktor –faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian Fiskal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan (3) Merumuskan Model Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten atau Kota di Jawa Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi

daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Maria Regina Tobi, (2016).

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah (Maria Regina Tobi, Farida Idayati, 2016).

Menurut Supriyadi, (2013) suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah, misalnya :

- a. Urusan umum dan pemerintahan
- b. Penyelesaian fasilitas pelayanan, dan
- c. Urusan sosial budaya, agama dan kemasyarakatan (Elmi, 2002).

Menurut Halim (2007) dalam Supriyadi (2013), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Desentralisasi fiskal terutama di maksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan factor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sector public, juga akuntabilitas public, dan transportasi dalam penyediaan jasa

public serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis Demelo, (2000)

Desentralisasi diperlukan untuk perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan infrastruktur, perbaikan akuntabilitas dan peningkatan mobilisasi dana Suahasil, (2006) dalam Ervina Anwar, (2014).

Mardiasmo (2002) dalam Ervina Anwar (2014), mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan karena ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat semakin besar sebagai wujud ketidakberdayaan pendapat asli. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah akan mengalami tekanan fiskal yang kuat karena rendahnya kapasitas fiskal ini mengidentifikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006, h5) di kutip dari Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai (2014), menyatakan bahwa desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assigment*) maupun aspek pengeluaran (*Expenditure assigment*).

Kurnia (2005) dalam Jaya Sriyana (2011), menemukan bahwa efisiensi fiskal dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kesesuaian pengeluaran belanjadengan preferensi masyarakat.dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah.pengukuran efisiensi alokasi initalah tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui. Efisiensi fiskal menyangkut pula aspek sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja daerah.

Depdagri pada tahun 1991 (Tan, 2010) dalam (Supriyadi, Armandelis, dan Selamat Rahmadi, 2013) tolak ukur derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Tolak Ukur Derajat Desentralisasi fiskal**

<b>Nilai Rasio (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah (Katagori Kriteria)</b>
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
➤ 50,00	Sangat Baik

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986:199) menegaskan beberapa ukuran :

1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktifitasnya dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya.jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan ,pembagian tugas ,wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat Pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengaatur dan mengurus rumah tangga daerahnya .Keahlian ,moral disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang di idam-idamkan daerah.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan .

4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah Harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri .Sumber-sumber dananya apasaja ,apakah PAD atau sebagian dari subsidi Pemerintah pusat.

### Indeks Kemandirian Daerah

Indeks ini dapat dipergunakan untuk menganalisa kemandirian suatu daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan keuangan dari daerahnya sendiri. Rasio yang digunakan untuk mengukur indeks. Dalam analisis ini ada dua macam yaitu:

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD)
2. Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)

Dari index ini dapat dilihat seberapa besar daerah dapat memenuhi penerimaannya.Penerimaan daerah terdiri atas 5 pos yaitu Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran,Bagian Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana Penimbangan, Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.(Reksohadiprojdo,2001:155) :

i. Indeks PAD =  $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \%$

ii. Indeks BHPBP

$$= \frac{\text{Sumbangan Daerah (SD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

iii. Indeks  $SD = \frac{\text{Sumbangan Daerah (SB)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$

### Indikator Desentralisasi Fiskal

Dalam membahas mengenai indicator desentralisasi fiskal, terdapat tiga variable yang merupakan reprerensi desentralisasi fiskal di Indonesia, ketiga variable tersebut adalah sebagai berikut :

a. Desentralisasi Pengeluaran

Variable didefinisikan sebagai rasio pengeluaran total. Masing-masing kabupaten/kota (APBD) terdapat total pengeluaran pemerintah (APBN) (Kerk dan Waller, 1997, zhang dan zou, 1998). Hal ini menunjukkan ukuranrelatif pengeluaran pemerintah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hasil study yang dilakukan Zhang dan Zou (1998), menunjukkan bahwa variable ini mempunyai pengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengimplementasikan bahwa desentralisasi fiskal gagal mendorong pertumbuhan ekonomi di China, hal ini mungkin merefleksikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan investasi di sector infrastruktur. Sementara studi yang dilakukan oleh Phillips dan Woller (1997) juga menunjukkan efek negative desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Negara-negara maju. Dan mereka gagal menjelaskan efek desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang.

b. Desentralisasi pengeluaran Pembangunan

Variabel ini didefinisikan sebagai rasio antara total pengeluaran pembangunan masing-masing kabupaten atau kota (APBD) terhadap total pengeluaran pembangunan Nasional (APBN) (Zhang dan Zou, 1998). Variabel ini menunjukkan besaran relative pengeluaran pemerintah dalam pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, variable ini juga mengekspresikan besarnya alokasi pengeluaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari rasio ini juga dapat diketahui apakah pemerintah daerah dalam posisi yang baik untuk melaksanakan investasi sector public atau tidak. Jika terdapat hubungan positif antara variable ini terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah local dalam posisi yang baik untuk melakukan investasi di sektor public

c. Desentralisasi Penerimaan

Variable ini didefenisikan sebagai rasio antara total penerimaan masing-masing kabupaten/kota (APBD) tidak termasuk subsidi terhadap total penerimaan pemerintah (Phillips dan Woller, 1997). Variable ini mengekspresikan besaran relative antara pendapatan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.



### **Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) dalam Supriyadi, Armandelis (2013), disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengam-bilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dari hal tersebut diatas, kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif.

Menurut Halim (2007) dalam Supriyadi (2013), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, walaupun pengukurannya kemampuan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan konsep pola "Hubungan Situasional" yang dikemukakan oleh heresy (halim,2004:188), yaitu :

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan ini menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominandari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan ini campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan ini peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat tingkat kemandirian daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pada pola hubungan ini campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dalam melaksanakan otonomi. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

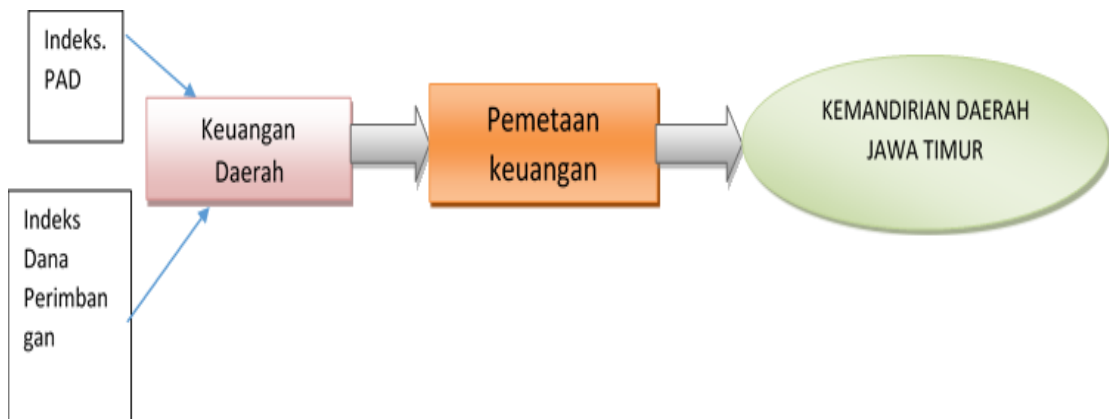
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat pada Tabel Berikut

**Tabel 2**  
**Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

(Halim,2004:189 )

### KERANGKA KONSEP



### HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah permasalahan, dimana tingkat dari kebenarannya masih perlu dilakukan suatu pengujian. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

1. Di duga terdapat pengaruh pemet pemetaan potensi keuangan daerah di masing-masing Kabupaten atau kota terhadap kemandirian keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
2. Di duga terdapat pengaruh tingkat Kemandirian Fiskal di Kabupaten/kota terhadap kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur.
3. Diduga terdapat pengaruh bahwa rekomendasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten/Kota berpengaruh terhadap kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah yang ada di Jawa Timur, hal ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang nantinya data tersebut akan dapat menguraikan hasil dari penelitian secara keseluruhan.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Dalam menganalisis parameter yang akan diteliti baik itu mengetahui potensi daerah maupun untuk mengetahui kemandirian daerah maka definisi Operasional Variabel adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaanmilik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, serta lain-lain PAD yang satuan persen
2. Dana Perimbangan adalah dana yang diperoleh dari Pajak Bagi hasil serta penelimaan dari pusat DAU dan DAK
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan dikuasai oleh negara ataupun daerah yang lebih tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penulis dalam hal ini memperoleh data penelitian berasal dari barbagai hal yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dimana data ini diperoleh langsung dari sumber asli melalui teknik wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, dengan kata lain peneliti memperoleh data tersebut melalui media perantara seperti dari kantor statistik propinsi Jawa Timur, dan Bappeda Jawa Timur

### **POPULASI DAN SAMPEL**

### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur,

### Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2005). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *total sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2007) populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 kabupaten di jawa timur.

### TEKNIK ANALISIS

#### 1. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah

Rasio ini mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan serta dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Rasio ini dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Indeks PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Rasio Dana Perimbangan

Rasio ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan daerah. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dengan total pendapatan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN HASIL PENELITIAN

#### Analisa Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam analisa Pendapatan daerah akan ditampilkan penerimaan daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur .Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 3berikut

**Tabel 3.**  
**penerimaan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2015**

Kab/ Kota	Pend.Daerah	PAD	Dana	Indeks	Indeks
-----------	-------------	-----	------	--------	--------

	(000)	(000)	Perimbangan (000)	PAD ( % )	Dana Perimbangan ( % )
1. Kota Surabaya	7.304.836.873	3.520.137.339	1.536.796.757	48,18	19,69
2. Kota Kediri	1.432.324.497	166.436.404	770.952.510	11,62	53,82
3. Kab. Sidoarjo	3.702.781.216	1.090.575.14	1.449.353.252	29,45	39,14
4. Kab. Gresik	2.565.135.034	842.196.737	1.131.468.608	32,83	44,10
5. Kab. Malang	3.303.969.223	333.189.098	1.895.537.664	10,08	57,37
6. Kota Malang	1.821.417.126	353.424.747	931.505.593	19,385	51,14
7. Kab. Banayuwangi	2.572.207.223	249.030994	1.469.636.765	9,68	57,11
8. Kab. Jember	3.129.650.675	508.051.017	1.863.099.834	16,21	59,53
9. Kab. Bojonegoro	3.195.069.711	262.951.712	2.144.452.866	8,20	67,1
10. Kab. Tuban	1.939.022.483	260.939.261	1.096.825.264	13,40	56,52
11. Kab. Mojokerto	2.230.693.946	400.009.300	1.084.684.979	17,93	48,60
12. Kab. Tulungagung	2.213.019.823	213.010.206	1.286.442.394	9,62	58,11
13. Kab. Pasuruan	2.480.405.639	372.454.140	1.286.442.394	15,0	51,85
14. Kab. Kediri	2.458.683.034	272.923.275	1.319.841.229	11,06	53,66
15. Kab. Probolinggo	2.121.341.946	184.19.6571	1.141.721.604	8,67	53,79
16. Kab. Jombang	2.103.180.775	256.125.950	1.184.405.880	12,17	56,300
17. Kab. Lumajang	1.897.958.994	170.242	1.118.111.139	8,96	58,93
18. Kab. Blitar	2.065.948.903	176.039.479	1.231.046.036	8,52	59,61
19. Kab. Lamongan	2.222.799.102	266.767.894	1.259.978.025	11,97	56,66
20. Kab. Sumenep	2.015.840.671	166.654.328	1.309.105.178	8,23	64,96
21. Kab. Nganjuk	2.132.109.612	237.473.871	1.175.871959	11,11	55,11
22. Kab.Situbondo	1.549.938.736	125.963.802	1.002.450.765	8,06	64,68

23. Kab. .Bangkalan	1.781.003.956	122.079.311	1.137.833.827	6,85	63,84
24. Kab. Ponorogo	1.890.938.986	177.247.642	1.172.450.159	9,36	62,01
25. Kab. Magetan	1.609.326.079	122.839.547	978.442.223	7,58	60,78
26. Kab. Ngawi	1.766.878.003	138.773.976	1.107.605.839	7,81	62,68
27. Kab. Bondowoso	1.611.254.065	122.173.828	1.001.040.533	7,57	62,13
28. Kab. Madiun	1.522.302.830	128.526.430	971.080.928	8,40	63,79
29. Kab.Trenggalek	1.620.457.377	124.094.454.	1.020.820.215	7,65	62,96
30. Kab. Sampang	1.474.017.178	121.298.115	999.734.485	8,20	67,77
31. Kota Madiun	989.473.907	111.379.359	593.152.373	11,22	59,95
32. Kab.Pamekasan	1.819.566.127	125.125.991	1.045.630.754	6,87	57,44
33. Kota Probolinggo	894.026.083	108.620.977	756.2732.181	12,08	84,56
34. Kota Batu	917.333.704	80.150.000	554.901.356	8,72	60,41
35. Kab/ Pacitan	1.272.572.005	89.469.532	833.044.603	6,99	65,48
36. Kota Mojokerto	852.099.820	92.842.136	593.338.493	10,79	69,60
37. Kota Pasuruan	2.480.405.639	92.842.136	1.315.925.847	3,70	53,02
38. Kota Blitar	784.167.167.165	82.436.369	536.976.838	10,45	68,36

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jawa Timur

Dari tabel diatas, Kabupaten dan kota di Jawa timur yang mempunyai PAD terbesar adalah: Kota Surabaya sebesar 48 ,18 % , Kabupaten Gresik sebesar 32,83 % , Kabupaten Sidoarjo Sebesar 29,49%.

Sedangkan kabupaten dan kota di Jawa Timur yang mempunyai Dana perimbangan terbesar adalah Kota probolinggo seebesar 84,56 % , Kota Mojokerto sebesar 69,60 % , Kabupaten Sampang 67,77% Kabupaten Bojonegoro sebesar 67,10, Kota Blitar sebesar 68,36% Kabupaten sumenep dan kabupaten Situbondo sebesar 64 % , Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Madiun sebesar lebih dari 63 %.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil klasifikasi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang dijelaskan pada tabel berikut :

Kabupaten/Kota	
Kota Surabaya	Sumbangan PAD 40-50% <b>Derajat desentralisasi fiscal Baik</b>
	48,18%
Kabupaten Gresik	Sumbangan PAD 30,01-40,005 <b>DERJAT DESENTRALISASI CUKUP</b>

	32,83 %
Kabupaten Sidoarjo	Sumbangan PAD 20,01-30,00% <b>Derajat Desentralisasi Sedang</b> 29,49%
1. Kabuapten Mojokerto 2. Kota Probolinggo 3. Kota Madiun 4. Kabupaten Nganjuk 5. Kota Mojokerto 6. Kota Blitar	Sumbangan PAD 10,01-20,00% <b>Derajat desentralisasi kurang</b> 17,92 % 12,02 % 11,22 % 11,11 % 10,79 % 10,45 % 00,00 – 10.00 %
Ada 29 Kabupaten dan kota di Jawa Timur - Kab Probolinggo (9,36%) - Kota Pasuruan (3,7%)	<b>Derajat Desentralisasi Sangat Kurang</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jawa Timur

Berdasarkan Kabupaten dengan Skala PAD lebih 50 % dengan Predikat sangat baik belum ada karena Surabaya Saja masih 48,18% Tetapi Kabupaten dan kota di Jawa Timur Yang mempunyai derajat desentralisasi Fiskal Baik.

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya pemerintah daerah tidak dapat di pisahkan dari pemerintah pusat, oleh karena itu kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak dapat di estimasi bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya, sebagai wujud dari pelaksanaan dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah, maka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan kesiapan untuk mengantisipasi dalam pelaksanaan otonomi yang baik dan bertanggung jawab, sehingga terlihat hasil dari pengembangan daerah tersebut.

Komitmen pimpinan daerah mengenai pengelolaan keuangan (*political will*) menjadi prioritas utama dalam manajemen pemerintahan sektor publik, kebijakan dalam pengelolaan akan sangat berpengaruh pada keseimbangan antara hasil penerimaan dan besarnya pembelanjaan. Strategi manajemen keuangan daerah yang ditetapkan merupakan program bersama yang sinergi antara legislatif dan eksekutif sehingga masyarakat akan harus diikutsertakan dan dukugannya akan sangat membantu, dengan memberdayakan masyarakat merupakan sinergi yang sangat bermanfaat, Baswir (1997) dalam Hadi S (2009).

Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Suhadak, (2007) dalam Anastasia Sianturi, (2014).

Sedangkan menurut Munir (2004, h 168) dalam Anastasia Sianturi, (2014), kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah.

Reksodiprojo dalam Munir (2004, h.106) dikutip dari Anastasia Sianturi, (2014), menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditujukan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah.

Dari hasil derajat desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa Kota Surabaya mempunyai derajat desentralisasi Fiskal Baik sebesar 48,18%, hal ini mengandung arti bahwa kota Surabaya dapat mengolah keuangannya dengan baik, sedangkan Kabupaten Gresik memiliki derajat desentralisasi fiskal yang cukup yaitu sebesar 32,83% dan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan memiliki derajat desentralisasi sedang. (29,49%). Hal ini disebabkan karena besarnya kontribusi sector industry. Sektor industri di Gresik dan Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis Jawa Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Selain itu perekonomian masyarakat Gresik dan Sidoarjo banyak ditopang dari sektor Usaha Kecil dan Menengah, diantaranya yaitu Industri Songkok, Pengrajin Tas, Pengrajin Perhiasan Emas & Perak, Industri Garment (konveksi).

Walaupun demikian kedua kabupaten ini harus lebih membenahi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kabupaten Gresik tentunya akan memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah yang salah satunya bersumber dari penerimaan pemerintah daerah kabupaten Gresik sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal pendapatan asli daerah berasal dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah, disamping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah yang sah lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan sertamenggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka pemerintah daerah kabupaten Gresik berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Sedangkan pada kabupaten Sidoarjo, dalam upayanya untuk mencapai target pendapatan asli daerah di temukan beberapa permasalahan. Secara umum permasalahan. Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta



untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi dan pendekatan dengan sektor terkait serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha akademisi maupun masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman pada masyarakat akan pengertian pajak dan manfaatnya bagi pembangunan
- c. Mengadakan program terobosan sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak makin meningkat.
- d. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk Derajat Desentralisasi Sangat Kurang, terdapat 29 Kabupaten dan kota di Jawa Timur, diantaranya Kota Probolinggo, Kota Pasuruan. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan dalam meningkatkan derajat desentralisasi, antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi  
Berbagai usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk meningkatkan pajak tidak akan berhasil jika kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Begitu juga dengan Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, namun kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar pajak dan retribusi.
- b) Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai  
Sistem informasi sangat dibutuhkan setiap orang terutama untuk organisasi agar dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Terdapat dua alasan utama mengapa terdapat perhatian yang besar terhadap sistem informasi, yaitu meningkatnya kompleksitas kegiatan organisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatnya kemampuan komputer. Selanjutnya, dengan tersedianya informasi yang berkualitas, tentunya juga akan meningkatkan kemampuan kompetitif (*competitive advantage*) organisasi yang dikelolanya.
- c) Kompetensi sumber daya aparatur yang kurang  
Kompetensi sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi, menurut Riva'i (2004, h.35) "tanpa didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang".

Bila dilihat dari data , maka terdapat kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat desentralisasi fiskal kurang dan sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/ kota tersebut memiliki tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tinggi. Menurut Anastasia Sianturi, (2014), pengukuran derajat desentralisasi fiskal ini semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah semakin rendah, dan demikian pulasebaliknya semakin rendah rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin besar.

### **Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur**

Menurut Norton dalam Suhadak (2007, h.153) yang dikutip dari Anastasia Sianturi, (2014), desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembanguna, sedangkan kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai pengeluaran itu. Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya.

Dalam hal terdapat beberapa rekomendasi dalam pembenahan kebijakan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Timur antara lain :

a) **Pembenahan infrastruktur untuk memberikan kepercayaan bagi investor**

infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu daerah dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat. Hasil ini sesuai dengan teori menurut Todaro (2000: 143) yang menjelaskan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

b) **Peningkatan sistem informasi dan teknologi**

Penggunaan sistem informasi dan teknologi atau internet yang dilakukan di daerah terkait dengan dunia usaha melalui situs web sebatas berita kegiatan atau media promosi mengenai hasil bumi, lokasi wisata, penyelenggaraan festival seni budaya, serta hasil kerajinan dan sebagainya. Dari sisi informasi hal tersebut sudah cukup lengkap dan informatif, namun perlu dikembangkan fasilitas yang mendukung komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha.

c) **Peningkatan sumber daya aparatur**

Perlunya penataan sistem rekrutmen pegawai; analisis jabatan; evaluasi jabatan; penyusunan standar kompetensi jabatan; penilaian individu berdasarkan kompetensi; pembangunan database pegawai; dan perbaikan kurikulum diklat. Ketidakseimbangan antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan kompetensi PNS demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari manajemen pegawai negeri sipil yang dikemukakan Sedarmayanti (2010, h.371) yang menyebutkan bahwa tujuan manajemen pegawai negeri sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan dukungan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil

d) Pemberian kemudahan perijinan dalam membuka akses usaha bagi UKM

Untuk membantu membuka akses pendanaan dan permodalan dari perbankan, pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan izin usaha bagi UKM. Ini menjadi bagian dari tugas pemda untuk mendukung program yang sistematis, bagi UKM, terutama yang baru memulai usaha. Pemda harus mendorong semua kegiatan yang berkaitan menumbuhkan wirausaha baru di Indonesia. Saat ini jumlah pengusaha berkualitas di Indonesia masih terlalu sedikit. Itu sebabnya, pemda dan masyarakat perlu meningkatkan jumlah pengusaha.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

- a) Dari hasil pemetaan potensi keuangan daerah di Jawa Timur tertinggi diperoleh hasil bahwa Kota Surabaya tertinggi dengan Kontribusi PAD 48,18 % (Derajat desentralisasi Baik). Peringkat kedua, Kabupaten Gresik 32,83 % (Derajat desentralisasi Cukup. Ketiga, Kabupaten Sidoarjo 29,49 % (Derajat Desentralisasi Sedang). Kota Surabaya memiliki PAD terbesar dan diikuti dengan daerah yang berdekatan dengan Surabaya dengan kontribusi terbesar dari sektor Industri dan Perdagangan ini karena elastisitas sektor industri dan perdagangan mendukung dan besar terhadap sumbangan pendapatan daerah.
- b) Tingkat Kemandirian Fiskal di Kabupaten/kota berpengaruh terhadap kemandirian Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur. Dari pemetaan potensi keuangan daerah diperoleh hasil sebanyak 35 Kabupaten/Kota (Derajat desentralisasi kurang sebanyak 6 Kab/Kota dan Derajat desentralisasi sangat kurang 29 Kab/Kota) yang masih sangat menggatungkan bantuan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa dana PAD dari 35 Kab/Kota hanya teralokasikan ke Belanja Rutin dalam pos pembiayaan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk sektor infrastruktur yang mendukung investasi dan perkembangan

daerah masih menggantungkan bantuan dari pemerintah daerah propinsi Jawa Timur

- c) Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di Kabupaten/Kota antara lain, masih perlunya pembenahan infrastruktur untuk memberikan kepercayaan bagi investor, peningkatan sistem informasi dan teknologi, peningkatan sumber daya aparatur, pemberian kemudahan perijinan dalam membuka akses usaha bagi UKM

Untuk membiayai kebutuhan belanja pemerintah yang semakin lama semakin meningkat, untuk itu tentu pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD Satu-satunya cara meningkatkan PAD salah satu caranya dengan menggali secara optimal potensi dari pemetaan potensi daerah menuju kemandirian keuangan sebagai tujuan dari otonomi daerah bisa tercapai. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat ukur lainnya sebagai alat analisis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Sianturi, Sjamsiar Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, 2014, Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah (Studi pada dinas Pendapatan Kota Batu), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.3, Hal. 557-563.
- Anonim, 1993, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Penerbit Beringin Jaya, Semarang .
- \_\_\_\_\_, 1999, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, Penerbit Kuraiko Pratama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Badan Pusat Statistik Daerah Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- Basri, 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI (Distorsing, Peluang dan Kendala)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2001*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Dasril, Henry & Hessel, 2004, *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta
- Elmi, Bchrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- Ervina Anwar, Anderson Kumenaung, dan Goerge Kawung, 2014, Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berskala Efisiensi, IEP – FEB Unsrat Manado
- Fuad, 2004, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

- Sumarsono Hadi, 2009, *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah : Kasus Kota Malang (1999-2004)*, JESP Vol. 1, No. 1, 2009
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP YKPN.
- Ibnu Syamsi, 1993, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, cetakan kedua, Penerbit PT.Bina Aksaram Jakarta.
- Jaka Sriyana, 2011, *Disparitas Fiskal Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 56-66
- Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah, edisi pertama*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khusaini, 2006, *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Penerbit BPFE UNIBRAW, Malang.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Maria Regina Tobi, Farida Idayati, 2016, *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Voume, 5, Nomor 8, Agustus 2016.
- Mohammad Sholahuddin Yusuf, Sjamsuddin, Tjahjanulin Domai, 2014, *Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.3, Hal. 550-556
- Notoatmodjo, s, 2005, *Promosi kesehatan teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Riduansyah, 2003, *Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi daerah*, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Saragih, Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Jakarta ; Penerbit Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta
- Supriyadi, Armandelis, dan Selamat Rahmadi, 2013, *Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1, No.1, Juli 2013.
- Syahrudin H, Mappa Nasrun, Alwi, 2009, *Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*, <https://id.scribd.com/document/111636114/Analisis-Strategi-Peningkatan-Pendapatan-Asli-Daerah-Pad-Dalam>